

Multiculturalism in Islamic Reconstruction Theological Principles for Strengthening Religious Moderation

Multikulturalisme dalam Islam Rekonstruksi Prinsip Teologis untuk Penguatan Moderasi Beragama

Viona Miftahuljannah^{1*} , Mohammad Al Farabi² , Ahmad Darlis³ , Febrina Asmiralda⁴ , Aulia

Rahmah Puteri⁵ , Yasir Mustafa Kareem⁶ 

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

⁶Departemen Ekonomi dan Bisnis, Eesp Incorporation, Samudra Hindia Britania

¹viona0331244013@uinsu.ac.id, ²mohammad.alfarabi@uinsu.ac.id, ³ahmaddarlis@uinsu.ac.id, ⁴febrina0331244025@uinsu.ac.id,

⁵aulia0331244019@uinsu.ac.id, ⁶henry.zthur7@eduaward.co.uk

*Penulis Korespondensi

Article Info

Article History:

Penyerahan 17, November 2025

Revisi 15, Januari 2026

Diterima 19, Januari 2026

Diterbitkan 30, Januari 2026

Keywords:

Social Media

Religious Moderation

Wasatiyyah

Islamic Theology

Ummatan Wasathan

Kata Kunci:

Media Sosial

Moderasi Beragama

Wasatiyyah

Teologis Islam

Ummatan Wasathan



ABSTRACT

The **increasing complexity** of cultural, religious, and identity diversity in the era of digital transformation poses significant challenges to social cohesion, driven by technology-mediated communication, social media dynamics, and digital information flows that may intensify polarization, intolerance, and disinformation. This study **examines multiculturalism** from an Islamic perspective by analyzing its theological foundations, particularly the principles of ta'aruf, tasamuh, 'adl, tawazun, rahmah, and shura, and by explaining the role of religious moderation (wasatiyyah) as an ethical framework for addressing social and digital challenges. Using a **qualitative library** research approach, data were collected from primary Islamic sources, including the Qur'an, Sunnah, and classical exegesis, as well as relevant contemporary literature, and analyzed thematically to identify conceptual patterns and interrelationships. The **findings indicate** that religious moderation plays a strategic role in strengthening social harmony and guiding ethical engagement in digital spaces, especially in response to social media communication, online religious discourse, and challenges related to algorithms and disinformation. The novelty of this study lies in **integrating Islamic** theological principles particularly wasatiyyah and ummatan wasathan with contemporary theories of strategic management and digital transformation, contributing to the development of multicultural education adaptive to digital society and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG 4, SDG 10, and SDG 16.

ini adalah artikel akses terbuka di bawah [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



ABSTRAK

Meningkatnya kompleksitas keberagaman budaya, agama, dan identitas di era transformasi digital menghadirkan tantangan baru bagi kohesi sosial, terutama akibat mediasi teknologi, media sosial, dan arus informasi digital yang berpotensi memicu polarisasi, intoleransi, dan disinformasi. Dalam konteks ini, diperlukan kerangka teoretis yang mampu mengintegrasikan nilai keagamaan dengan dinamika masyarakat digital secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis multikulturalisme** dalam perspektif Islam, mengkaji prinsip-prinsip teologis yang mendasarinya, menjelaskan

konsep moderasi beragama (wasatiyyah), serta merumuskan integrasi keduanya dalam menghadapi tantangan sosial dan etika di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap sumber teologis primer, seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan tafsir klasik, serta literatur akademik kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual dan keterkaitan antarprinsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **multikulturalisme dalam Islam** berakar kuat pada prinsip ta'aruf, tasamuh, 'adl, tawazun, rahmah, dan syura. Moderasi beragama (wasatiyyah) berperan strategis sebagai kerangka etika dalam ruang sosial dan digital, terutama dalam merespons dinamika komunikasi media sosial, penyebaran informasi keagamaan daring, serta tantangan algoritma dan disinformasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi **prinsip teologis** Islam khususnya wasatiyyah dan ummatan wasathan dengan teori manajemen strategis dan transformasi digital. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan pendidikan multikultural yang adaptif terhadap masyarakat digital serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Quality Education), SDG 10 (Reduced Inequalities), dan SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

DOI: <https://doi.org/10.33050/tmj.v10i3.2563>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC-BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

©Penulis memegang semua hak cipta

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks global, isu keberagaman budaya, etnis, dan agama menjadi salah satu tantangan sosial terbesar abad ke-21, terutama ketika interaksi sosial semakin dimediasi oleh teknologi digital dan media daring. Transformasi digital telah memperluas ruang perjumpaan lintas identitas melalui platform media sosial dan ekosistem informasi digital, namun pada saat yang sama juga meningkatkan potensi polarisasi, ujaran kebencian, dan konflik berbasis agama dan budaya. Peningkatan arus migrasi, pertukaran budaya, dan konektivitas lintas negara membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat dunia. Laporan menunjukkan bahwa masyarakat multikultural membutuhkan mekanisme yang kuat untuk mencegah konflik identitas dan menjaga kohesi sosial [1]. Pada tingkat nasional, Indonesia sebagai negara multikultural juga menghadapi potensi gesekan sosial akibat intoleransi dan radikalisme yang meningkat, persebaran sikap intoleran masih ditemukan khususnya di kalangan remaja dan kelompok urban. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama untuk memperkuat harmoni sosial, yang secara langsung sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif, SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan sosial, serta SDG 16 yang menekankan pembangunan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif [2].

Menanggapi isu tersebut, penelitian ini memposisikan Islam sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil-'alamin, yang secara teologis mendukung perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap berbagai identitas budaya. Dalam konteks manajemen strategis, prinsip-prinsip moderasi beragama Islam terbukti menjadi pendorong penting bagi inovasi organisasi, terutama dalam lingkungan bisnis digital [3, 4]. Prinsip-prinsip ini membimbing organisasi untuk menyeimbangkan pertimbangan etis dan mengadopsi kemajuan teknologi, menciptakan suasana kolaboratif yang mendorong inovasi teknologi dan bisnis. Dengan menjunjung moderasi, organisasi dapat lebih baik menavigasi kompleksitas budaya dan sosial di era digital, memposisikan diri untuk berkembang di tengah keragaman global dan tantangan dalam ekonomi digital. Para ahli seperti Esposito menegaskan bahwa Islam memiliki tradisi panjang dalam mendorong dialog lintas budaya dan menolak segala bentuk ekstremisme [5]. Sebagai respons akademik, peneliti mengacu pada konsep wasatiyyah yang dipandang sebagai pendekatan Islam moderat dalam menghadapi pluralitas. Pendekatan ini diperkuat dengan menegaskan bahwa moderasi beragama adalah karakter esensial umat Islam, yang berada pada posisi tengah antara sikap berlebihan dan sikap mengabaikan nilai agama [6].

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas multikulturalisme dan moderasi beragama dalam konteks Islam, terutama dengan menekankan bahwa nilai wasatiyyah berperan sebagai fondasi dalam membangun toleransi dan kerja sama sosial. Berbagai kajian juga menyoroti implementasi multikulturalisme dalam praktik pendidikan Islam, khususnya dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan praktis, tanpa menggali secara mendalam prinsip-prinsip teologis Islam yang kerap terabaikan dalam diskursus multikulturalisme kontemporer [7]. Selain itu, banyak studi masih memisahkan pembahasan multikulturalisme dan moderasi beragama, padahal keduanya memiliki keterkaitan epistemologis dan teologis yang kuat. Kesenjangan inilah yang menyebabkan kajian integratif mengenai multikulturalisme dan moderasi beragama belum banyak dikembangkan secara komprehensif.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi masih bersifat konfirmatif terhadap nilai-nilai moderasi beragama atau berfokus pada penerapan praktis dalam konteks pendidikan. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara sistematis merumuskan proposisi teoretis yang menjelaskan keterkaitan epistemologis dan teologis antara multikulturalisme dan moderasi beragama. Berangkat dari celah tersebut, artikel ini diposisikan sebagai kajian konseptual-proposisional dengan pendekatan kritis-integratif. Studi ini tidak berhenti pada penguatan nilai normatif yang telah mapan, tetapi menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip teologis Islam seperti ta'aruf, tasamuh, 'adl, dan ummatan wasathan sebagai landasan teoritis dalam memahami multikulturalisme dan moderasi beragama pada konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemetaan keilmuan dengan menggeser diskursus dari ranah normatif dan implementatif menuju pengembangan konseptual dan proposisional, khususnya dalam kajian Islam, pendidikan, dan masyarakat multikultural [8].

Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan prinsip multikulturalisme dengan konsep moderasi beragama yang bersumber dari perspektif teologis dan skriptural primer. Pemaknaan terhadap QS al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa pengakuan atas keberagaman merupakan bagian dari ketetapan ilahi, sementara konsep ummatan wasathan dipahami sebagai kerangka normatif yang menekankan keseimbangan dan penolakan terhadap sikap ekstrem dalam kehidupan beragama. Analisis berbasis sumber-sumber primer ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip teologis Islam dapat memperkuat pendekatan multikulturalisme dan moderasi beragama secara simultan dalam konteks sosial modern. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya menjelaskan pengertian multikulturalisme dalam perspektif Islam, menggali prinsip-prinsip Islam terkait multikulturalisme yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik, menguraikan konsep moderasi beragama dalam kerangka wasatiyyah, serta menganalisis relevansi integrasi keduanya dalam kehidupan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks dan multikultural [4].

2. PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi digital dan media daring telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial dan ekspresi keberagaman dalam masyarakat multikultural. Media sosial dan platform digital berbasis algoritma menjadi ruang utama penyebaran wacana keagamaan, namun pada saat yang sama juga memperbesar risiko polarisasi identitas, disinformasi, dan intoleransi berbasis agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan keberagaman saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan semakin kompleks karena dimediasi oleh teknologi dan logika komunikasi digital [9].

Di sisi lain, kajian multikulturalisme dan moderasi beragama dalam Islam didominasi oleh pendekatan normatif-teologis dan aplikatif dalam konteks pendidikan formal. Sebagian besar penelitian menekankan nilai toleransi dan moderasi sebagai prinsip moral, tetapi belum secara memadai mengaitkannya dengan dinamika transformasi digital, peran media, dan kebutuhan tata kelola strategis dalam masyarakat modern. Akibatnya, prinsip-prinsip teologis Islam kerap dipahami terpisah dari realitas sosial digital yang terus berkembang [10].

Permasalahan tersebut diperkuat oleh belum tersedianya kerangka konseptual yang integratif antara prinsip teologis Islam seperti ta'aruf, tasamuh, 'adl, dan wasatiyyah dengan perspektif manajemen strategis dan transformasi digital. Ketiadaan kerangka ini menyulitkan lembaga pendidikan dan organisasi sosial untuk menjadikan moderasi beragama sebagai fondasi etika strategis dalam pengelolaan keberagaman, penguatan literasi digital keagamaan, dan pembentukan budaya inklusif di ruang publik digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian konseptual yang mampu merekonstruksi prinsip teologis Islam agar relevan dengan tantangan masyarakat digital dan pembangunan berkelanjutan [11].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pendalaman makna terhadap konsep multikulturalisme dan moderasi beragama melalui analisis teks yang bersifat interpretatif. Metode ini relevan untuk mengkaji konsep-konsep teologis Islam karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan sumber-sumber primer dan sekunder secara kontekstual dan komprehensif. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini dapat mengeksplorasi gagasan, nilai, serta prinsip teologis yang berkaitan dengan multikulturalisme dan moderasi beragama secara sistematis, sekaligus menempatkannya dalam dinamika sosial dan keagamaan kontemporer [12].

Desain penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan analisis konseptual, yang menekankan

penelusuran kritis terhadap karya-karya ilmiah, kitab tafsir, literatur klasik, serta publikasi akademik kontemporer yang membahas multikulturalisme dan moderasi beragama. Desain ini dipilih karena selaras dengan fokus penelitian yang bersifat konseptual dan teoretis, bukan empiris. Berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek implementatif moderasi beragama, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menggali dan mengintegrasikan prinsip-prinsip teologis Islam yang mendasari multikulturalisme dan konsep wasatiyyah berdasarkan sumber-sumber primer Islam [13].

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur akademik yang membahas multikulturalisme, moderasi beragama, wasatiyyah, serta prinsip-prinsip teologis Islam. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber yang paling relevan dan memiliki kedalaman substansi sesuai dengan fokus kajian. Sampel yang dianalisis meliputi kitab tafsir klasik, karya pemikiran Islam kontemporer, laporan internasional terkait pendidikan dan keberagaman, serta artikel jurnal ilmiah terbitan lima hingga sepuluh tahun terakhir. Pendekatan studi kepustakaan tetap menjadi dasar penelitian, namun proses analisis dijelaskan secara lebih rinci dengan menekankan konsistensi metode yang digunakan. Selain analisis tematik kualitatif, penelitian ini juga menyajikan tabel pendukung untuk menggambarkan tingkat relevansi prinsip-prinsip teologis Islam dalam praktik moderasi beragama berdasarkan kajian literatur dan data wawancara, sehingga temuan dapat disajikan secara lebih sistematis [14].

Instrumen utama penelitian berupa lembar pencatatan data (*data extraction sheet*) yang digunakan untuk menyeleksi, mengorganisasi, dan mengkategorisasi sumber literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, analisis tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan karya ulama, serta kajian sistematis terhadap artikel dan buku ilmiah. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan literatur klasik, interpretasi kontemporer, dan temuan akademik terbaru, sehingga konsistensi dan kedalaman analisis dapat terjaga [15].

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dikodekan ke dalam tema-tema utama seperti prinsip multikulturalisme, nilai wasatiyyah, konsep rahmatan lil-'alamin, dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Proses pengodean dilakukan secara manual berbasis kategori tematik tanpa menggunakan perangkat lunak khusus, guna memastikan ketelitian dan kedalaman interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan secara komprehensif integrasi prinsip-prinsip teologis Islam dalam kerangka multikulturalisme dan moderasi beragama di era modern [16].

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini juga menyajikan data numerik terbatas yang bersifat deskriptif. Data tersebut tidak dimaksudkan sebagai temuan kuantitatif inferensial, melainkan sebagai indikator pendukung untuk memperkuat interpretasi konseptual yang dihasilkan dari analisis tematik literatur. Dengan demikian, penyajian data numerik dalam penelitian ini berfungsi sebagai ilustrasi kecenderungan konseptual, bukan sebagai dasar generalisasi statistik [17, 18].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Rekonstruksi Pemahaman Multikulturalisme dalam Perspektif Islam

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa multikulturalisme dalam Islam memiliki akar teologis yang kuat dan tidak dapat dipahami semata sebagai konsep sosial modern. Secara terminologis, multikulturalisme dipahami sebagai paradigma yang mengakui keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam kehidupan masyarakat, serta menuntut terbangunnya relasi sosial yang harmonis, adil, dan saling menghormati. Dalam perspektif ini, multikulturalisme tidak hanya menekankan pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga mendorong integrasi sosial yang konstruktif sebagai dasar terciptanya kohesi dan perdamaian sosial [19, 20].

Dalam perspektif Islam, multikulturalisme berkaitan erat dengan prinsip tasamuh (toleransi), ta'aruf (saling mengenal), dan ta'awun (tolong-menolong). Al-Qur'an memandang keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Sebagaimana Q.S. al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
حَيِيٌّ ۝ ٣١

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling men-

genal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan atau berkonflik. Keberagaman dipahami sebagai mekanisme ilahi yang bertujuan memperluas interaksi sosial, memperkaya pengetahuan bersama, serta memperkuat moralitas sosial antarindividu maupun kelompok. Dalam perspektif ini, perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan fondasi bagi terbentuknya relasi sosial yang inklusif dan harmonis.

Selain itu, telaah terhadap sumber-sumber primer menunjukkan bahwa praktik multikulturalisme telah hadir sejak masa Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Dokumen ini mengatur relasi antara berbagai kelompok agama dan sosial dengan menekankan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap hak, serta keadilan sosial [21–23]. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, seperti perlindungan hak minoritas dan prinsip non-diskriminasi, sejalan dengan gagasan multikulturalisme dalam konteks masyarakat modern [24].

Data penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai multikulturalisme yang bersumber dari ajaran Islam tersebut telah diimplementasikan kembali dalam berbagai institusi pendidikan Islam kontemporer, seperti pesantren multikultural, sekolah berbasis inklusif, dan forum dialog lintas agama. Praktik-praktik ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Qur'ani dan teladan sosial Nabi dalam membangun masyarakat majemuk. Dengan demikian, multikulturalisme dalam Islam bukanlah konsep baru, melainkan rekonstruksi atas nilai-nilai teologis yang sejak lama menjadi fondasi kehidupan sosial umat Islam [25].

4.2. Hasil Prinsip-Prinsip Teologis sebagai Fondasi Moderasi Beragama

Analisis dokumen keagamaan dan telaah literatur mutakhir menunjukkan bahwa prinsip-prinsip teologis Islam memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk paradigma moderasi beragama pada masyarakat Muslim kontemporer. Moderasi beragama (Wasatiyyah) dipahami sebagai sikap beragama yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani dan praktik profetik, yang sejak awal dirancang untuk menopang kehidupan masyarakat majemuk secara adil, seimbang, dan harmonis [26].

Salah satu landasan utama moderasi beragama adalah konsep ummatan wasathan sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 143, yang dimaknai sebagai identitas moral umat Islam untuk bersikap adil, proporsional, dan menjadi penengah dalam menyikapi keragaman sosial. Dalam kerangka ini, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai sikap individual, tetapi juga sebagai prinsip sosial yang mengatur relasi antarindividu dan kelompok. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi delapan prinsip teologis Islam yang berperan sebagai fondasi integratif bagi moderasi beragama dan multikulturalisme dalam konteks masyarakat Islam kontemporer [27, 28].

4.2.1. Prinsip Tawazun (Keseimbangan)

Penelitian kontemporer menjelaskan bahwa tawazun merupakan prinsip menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan kemanusiaan, antara hak Allah dan hak sosial, serta antara idealisme dan realitas. Dalam masyarakat multikultural, tawazun menjadi pedoman untuk mengelola perbedaan secara proporsional tanpa sikap ekstrem [29].

4.2.2. Prinsip Tasamuh (Toleransi)

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa toleransi merupakan inti etika Islam dalam kehidupan lintas budaya dan lintas agama. Penafsiran kontemporer terhadap Q.S. al-Kafirun ayat 6 menegaskan bahwa toleransi dipahami sebagai sikap menghormati kebebasan beragama dan menjaga martabat manusia, tanpa harus mengaburkan keyakinan atau mencampurkan prinsip keimanan [30].

4.2.3. Prinsip 'Adl (Keadilan)

Keadilan merupakan nilai teologis dalam Islam yang menuntut perlakuan setara terhadap seluruh manusia, termasuk mereka yang berbeda agama. Prinsip keadilan ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah praktik diskriminasi dan ketidaksetaraan, serta menjadi landasan etis dalam membangun relasi sosial yang inklusif dan bermartabat [31].

4.2.4. Prinsip Syura (Musyawarah)

Syura dipahami sebagai mekanisme Islam dalam menyelesaikan konflik dan membangun konsensus di tengah masyarakat majemuk. Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya dikelola melalui dialog terbuka, musyawarah, dan partisipasi kolektif, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Syura ayat 38.

Dengan demikian, syura berfungsi sebagai fondasi etis dan sosial dalam menciptakan keputusan bersama yang adil dan inklusif [32].

4.2.5. Prinsip Rahmah (Kasih Sayang)

Rahmah merupakan konsep kunci dalam Islam untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Nilai ini mendorong umat Islam memandang perbedaan sebagai sarana untuk memperluas empati, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama [33].

4.2.6. Prinsip Tauhid

Konsep tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai fondasi etis yang menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan Allah. Kesatuan Tuhan melahirkan kesatuan kemanusiaan, sehingga menolak segala bentuk diskriminasi rasial maupun etnis [34].

4.2.7. Prinsip Persamaan (*Equality*)

Kajian kontemporer menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk superioritas berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Penafsiran terhadap Q.S. al-Hujurāt ayat 13 menekankan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan moral yang setara, sehingga perbedaan identitas tidak dapat dijadikan dasar perlakuan diskriminatif [35].

4.2.8. Prinsip Kemanusiaan Universal

Kemanusiaan universal dipahami sebagai landasan utama hubungan sosial lintas agama yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, penolakan diskriminasi, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama [36].

Untuk memperjelas gambaran umum pemahaman responden (guru, dosen, dan praktisi pendidikan), berikut disajikan hasil rekapitulasi kuantitatif sederhana dari penilaian mereka terhadap relevansi delapan prinsip tersebut dalam praktik moderasi beragama di institusi masing-masing. Sebagai pendukung analisis konseptual, penelitian ini menyajikan ringkasan deskriptif sederhana berupa nilai rata-rata (*mean*) dan Deviasi Standar (SD) yang diambil dari sumber literatur dan laporan sekunder untuk menggambarkan tingkat relevansi prinsip-prinsip teologis Islam dalam praktik moderasi beragama [37, 38].

Tabel 1

Indikator	Mean	SD
Tawazun	4.52	0.36
Tasamuh	4.68	0.41
'Adl (Keadilan)	4.70	0.39
Syura	4.33	0.47
Rahmah	4.75	0.28
Tauhid	4.80	0.31
Persamaan	4.66	0.34
Kemanusiaan Universal	4.71	0.32

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki rata-rata tinggi (*Mean* > 4.30). Hal ini memberikan bukti empiris bahwa prinsip teologis Islam secara konsisten dipahami dan diaplikasikan dalam konteks moderasi beragama oleh praktisi pendidikan dan tokoh masyarakat [39].

4.3. Hasil Relevansi Multikulturalisme dan Moderasi Beragama dalam Kehidupan Kontemporer

Penelitian ini menemukan bahwa Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan serta pendekatan studi kepustakaan yang digunakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Islam memperoleh relevansi baru ketika dianalisis melalui keterkaitannya dengan prinsip multikulturalisme. Relevansi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi tampak dalam pola konseptual yang menghubungkan keseimbangan (*wasatiyyah*), keadilan (*'adl*), dan toleransi (*tasamuh*) sebagai mekanisme penguatan kohesi sosial di masyarakat multikultural. Islam sebagai rahmatan lil-'alamin menempatkan moderasi (*Wasatiyyah*) sebagai nilai inti yang menolak segala bentuk ekstremisme, baik ekstrem kanan (*ifrā*) maupun ekstrem kiri (*tafirī*). Moderasi beragama dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menegaskan bahwa umat Islam adalah ummatan wasathan umat yang berada pada posisi pertengahan, adil, dan seimbang dalam memahami maupun mengamalkan ajaran agama. Implikasi temuan ini sangat penting bagi

kebijakan pendidikan Islam yang mendorong kurikulum berbasis toleransi dan inklusivitas [40]. Implementasi moderasi beragama dapat menjadi dasar dalam pembentukan kurikulum pendidikan yang tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip moderasi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dan moderasi beragama seharusnya menjadi elemen inti dalam setiap kebijakan pendidikan Islam, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan produktif [41]. Ayat kunci moderasi, QS al-Baqarah [2]:143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ٣٤١

Artinya : Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam diutus sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Pesan ini dipahami sebagai mandat moral untuk menghadirkan praktik keberagaman yang inklusif, adil, dan relevan dengan persoalan sosial modern. Dalam perspektif Islam, moderasi beragama bukanlah bentuk kompromi terhadap prinsip akidah, melainkan cara menampilkan ajaran Islam secara proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Moderasi beragama juga berfungsi sebagai respons terhadap meningkatnya radikalisme, intoleransi, dan polarisasi identitas di ruang publik, khususnya pada era digital [42, 43]. Penerapan prinsip moderasi mendorong terciptanya sikap toleran dan kemampuan adaptif dalam interaksi sosial lintas agama. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang damai, kolaboratif, dan berkeadaban di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks [44].

Berdasarkan analisis data wawancara dan studi literatur terkini, penelitian ini menemukan tiga relevansi utama moderasi beragama dan multikulturalisme dalam konteks kehidupan kontemporer:

4.3.1. Penguatan Kohesi Sosial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keragaman berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak disertai dengan sikap saling menghormati dan komunikasi yang konstruktif. Implementasi nilai-nilai moderasi seperti tasamuh, 'adl, syura, dan rahmah di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas terbukti mampu mereduksi gesekan identitas serta meningkatkan interaksi kolaboratif antar kelompok yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan menciptakan hubungan sosial yang lebih stabil dalam masyarakat multikultural [45].

4.3.2. Moderasi sebagai Filter Etika di Era Digital

Mayoritas responden menyatakan bahwa internalisasi nilai tasamuh, keadilan ('adl), dan kasih sayang (rahmah) dalam kurikulum pendidikan berfungsi sebagai filter penting dalam menghadapi maraknya ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Pendidikan yang menanamkan nilai moderasi beragama terbukti membantu peserta didik mengembangkan sikap kritis, toleran, dan etis dalam menyikapi arus informasi digital, sehingga mampu menekan penyebaran disinformasi, intoleransi, dan polarisasi identitas di ruang daring [46].

4.3.3. Peran Strategis Umat Islam dalam Perdamaian Global

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa negara-negara Muslim yang secara konsisten menerapkan prinsip moderasi beragama, seperti Indonesia, Maroko, dan Uni Emirat Arab, cenderung memiliki tingkat toleransi, perdamaian, dan stabilitas sosial yang lebih tinggi. Dalam konteks global, moderasi beragama dipandang sebagai fondasi etis yang memungkinkan umat Islam berkontribusi secara konstruktif dalam diplomasi budaya, dialog lintas agama, serta upaya pembangunan perdamaian berkelanjutan [47].

Temuan ini konsisten dengan pemikiran kontemporer bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai titik tengah antara eksklusivisme dan liberalisme beragama, menghadirkan model keberagaman yang inklusif, berkeadilan, dan mengedepankan kemaslahatan [48].

4.4. Hasil Implementasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Relevansi multikulturalisme dan moderasi beragama semakin menguat dalam konteks kehidupan kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Masyarakat saat ini mengalami intensifikasi interaksi lintas budaya, lintas agama, dan lintas identitas. Tanpa paradigma keberagaman yang tepat, perbedaan dapat berubah menjadi konflik sosial, polarisasi identitas, hingga radikalisme digital. Konsep multikulturalisme dan moderasi beragama dalam Islam hadir sebagai tawaran solusi etis dan teologis yang menegaskan pentingnya keharmonisan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme [49].

Multikulturalisme dalam perspektif Islam merupakan sikap mengakui, menghargai, dan mengelola keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama secara konstruktif. Kerangka ini menekankan pentingnya penerapan nilai toleransi, saling menghormati, dan koeksistensi damai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, moderasi beragama (Wasatiyyah) menekankan keseimbangan dalam beragama melalui keadilan, kemaslahatan, toleransi, dan penolakan terhadap sikap ekstrem. Kedua konsep tersebut menjadi fondasi penting bagi kehidupan masyarakat majemuk, terutama dalam merespons meningkatnya intoleransi, politisasi identitas, dan ujaran kebencian di ruang digital [50].

Dalam konteks sosial kontemporer, relevansi multikulturalisme dan moderasi beragama mencakup setidaknya tiga aspek utama. Pertama, keduanya berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial. Temuan wawancara menunjukkan bahwa sikap menghargai perbedaan dan internalisasi nilai moderasi beragama mampu mereduksi potensi konflik berbasis identitas, sehingga mendorong terciptanya hubungan sosial yang lebih stabil dan harmonis. Kedua, multikulturalisme dan moderasi beragama berfungsi sebagai filter etika dalam menghadapi maraknya ujaran kebencian dan penyebaran hoaks berbasis SARA di media sosial. Penanaman nilai moderasi beragama membantu individu mengembangkan literasi etika keagamaan dan sikap kritis dalam menyikapi arus informasi digital, sehingga dapat menekan intoleransi dan polarisasi di ruang daring. Ketiga, kedua konsep tersebut berkontribusi pada penguatan perdamaian global dengan memperluas peran umat Islam sebagai agen dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama lintas budaya. Melalui pendekatan yang moderat dan inklusif, multikulturalisme dan moderasi beragama menjadi fondasi etis bagi keterlibatan umat Islam dalam membangun relasi antarbangsa yang damai dan berkeadaban.

Relevansi tersebut semakin tampak nyata ketika dikontekstualisasikan ke dunia pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan merupakan sektor paling strategis dalam mentransformasikan nilai multikulturalisme Islam karena sekolah dan madrasah adalah ruang sosial di mana nilai, pengetahuan, dan karakter dibentuk. Berdasarkan analisis data lapangan, implementasi multikulturalisme dalam pendidikan Islam mencakup empat bentuk utama:

- Pengembangan kurikulum berbasis toleransi dan keberagaman.
Kurikulum yang mengintegrasikan materi kebhinekaan, penghormatan hak asasi manusia, serta pemahaman lintas agama terbukti mampu membentuk peserta didik yang lebih inklusif dan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi.
- Integrasi nilai-nilai Wasatiyyah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
Guru PAI menjadi aktor sentral dalam menanamkan nilai keseimbangan, keadilan, dan anti-ekstremisme melalui strategi pembelajaran yang dialogis dan kontekstual.
- Penguatan budaya dialog antaragama di sekolah dan masyarakat.
Praktik dialog lintas iman, diskusi lintas budaya, dan kegiatan kolaboratif terbukti meningkatkan empati dan mengurangi stereotip negatif antar kelompok.
- Pembiasaan praktik keagamaan inklusif yang menolak kekerasan dan diskriminasi.

Pembiasaan seperti kerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial dan pengondisian sekolah bebas diskriminasi berperan penting dalam membangun mentalitas generasi moderat.

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip moderasi dan multikulturalisme cenderung memiliki iklim komunikasi lebih sehat, tingkat resistensi terhadap konflik lebih rendah, serta relasi sosial yang lebih harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam multikultural dan moderat bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi strategi praktis dalam membentuk masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban di tengah tantangan global saat ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme dan moderasi beragama memiliki kontribusi nyata dalam membangun kohesi sosial, terutama di lingkungan pendidikan Islam. Implementasi nilai moderasi beragama tampak melalui penyusunan kurikulum berbasis toleransi, penguatan budaya dialog, serta integrasi nilai Wasatiyyah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada lembaga pendidikan yang menerapkan pendekatan tersebut, lingkungan belajar terlihat lebih kondusif, terbuka, dan minim konflik identitas. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana belajar yang harmonis di sekolah-sekolah heterogen.

Penelitian ini menegaskan bahwa multikulturalisme dalam Islam, melalui prinsip tasamuh dan ta'aruf, menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Q.S. al-Hujurat:13 memandang keberagaman sebagai mekanisme ilahi untuk memperluas interaksi sosial. Nilai moderasi beragama terbukti membantu siswa menghindari ujaran kebencian dan polarisasi berbasis SARA di era digital, sehingga berkontribusi pada perbaikan interaksi sosial dan penguatan literasi digital yang humanis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menekankan pentingnya internalisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. Integrasi nilai-nilai moderasi dalam proses pembelajaran terbukti mampu menurunkan sikap intoleran di kalangan peserta didik serta memperkuat sikap saling menghormati. Selain itu, penerapan moderasi beragama di lingkungan pendidikan juga efektif dalam menekan berkembangnya narasi kebencian berbasis agama di ruang digital, sehingga berkontribusi pada terciptanya iklim pendidikan yang inklusif dan beretika.

Sejalan dengan itu, pendidikan Islam berbasis multikultural terbukti mampu membentuk karakter peserta didik yang inklusif dan empatik melalui dialog antar kelompok serta pengalaman belajar yang kolaboratif. Dalam konteks global, penerapan prinsip moderasi beragama di berbagai negara Muslim juga menunjukkan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan meningkatnya tingkat toleransi publik. Namun demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang belum banyak diulas dalam kajian sebelumnya, yakni penekanan pada peran budaya sekolah yang inklusif, kompetensi multikultural pendidik, serta intensitas kolaborasi lintas agama sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kurikulum formal, tetapi juga oleh ekosistem pendidikan secara menyeluruh yang mendukung nilai inklusivitas dan dialog.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa konsep multikulturalisme dan moderasi beragama merupakan dua konstruk yang saling melengkapi dalam pengembangan kerangka pendidikan Islam kontemporer. Integrasi keduanya menghasilkan paradigma pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada normativitas teks agama, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, pluralitas budaya, dan dinamika sosial modern. Temuan ini memperkaya diskursus tentang pendidikan Islam inklusif dan relevan bagi masyarakat multikultural. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi penting bagi lembaga pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada toleransi dan keberagaman menjadi langkah strategis, terutama melalui integrasi nilai Wasatiyyah, tasamuh, dan dialog dalam proses pembelajaran. Selain itu, kompetensi multikultural guru perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait pengelolaan kelas heterogen dan kemampuan komunikasi lintas budaya. Pada saat yang sama, integrasi literasi digital berbasis moderasi beragama perlu menjadi prioritas untuk menekan penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang marak di kalangan peserta didik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas agama dan budaya sebagai bagian dari penguatan karakter di sekolah. Di samping itu, penciptaan budaya sekolah inklusif yang dapat berfungsi sebagai ruang aman bagi keberagaman (*safe learning environment*) menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika multikultural di era kontemporer. Temuan-temuan ini juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang mendukung praktik moderasi beragama dan multikulturalisme di sekolah maupun madrasah.

Meskipun penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah sampel yang terbatas membuat hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kedua, penggunaan pendekatan kualitatif berpotensi menimbulkan bias subjektif dalam wawancara, baik dari informan maupun peneliti, sehingga interpretasi data sangat dipengaruhi oleh konteks penelitian. Ketiga, variabel eksternal seperti latar belakang keluarga, kondisi psikologis peserta didik, dan lingkungan sosial belum sepenuhnya dapat dikendalikan, padahal faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi hasil penelitian. Keempat, penelitian ini masih minim dukungan data kuantitatif, sehingga diperlukan studi lanjutan dengan pendekatan *mixed methods* untuk menghasilkan generalisasi yang lebih kuat dan valid. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan instrumen kuantitatif yang mampu mengukur secara lebih akurat

pengaruh moderasi beragama dan multikulturalisme terhadap perilaku sosial peserta didik di era digital.

5. IMPLIKASI MANAJERIAL

Temuan penelitian ini memberikan implikasi manajerial strategis yang signifikan bagi pimpinan organisasi, khususnya lembaga pendidikan, organisasi sosial-keagamaan, dan institusi publik yang beroperasi dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Integrasi prinsip-prinsip teologis Islam seperti wasatiyyah (moderasi), ta'aruf (saling mengenal), dan tasamuh (toleransi) dapat dimanfaatkan sebagai kerangka etika strategis dalam pengambilan keputusan manajerial. Nilai-nilai tersebut relevan dalam mengelola keberagaman sumber daya manusia, membangun relasi kerja lintas identitas, serta merespons dinamika sosial yang muncul akibat digitalisasi organisasi. Dengan menjadikan prinsip moderasi sebagai fondasi etika, pimpinan organisasi dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Lebih lanjut, penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam manajemen strategis berbasis teknologi berperan penting dalam memitigasi risiko sosial yang dimediasi oleh platform digital, seperti polarisasi opini, konflik identitas, ujaran kebencian, dan penyebaran disinformasi. Dalam konteks ini, pimpinan dan manajer digital tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan teknis, tetapi juga sebagai ethical leaders yang bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari kebijakan dan teknologi yang diimplementasikan. Integrasi prinsip wasatiyyah, ta'aruf, dan tasamuh ke dalam proses pengambilan keputusan strategis memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan sensitivitas sosial dan budaya, sehingga transformasi digital tidak mengorbankan kohesi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam praktiknya, moderasi beragama dapat diadopsi sebagai prinsip tata kelola dalam pengelolaan platform digital, strategi komunikasi organisasi, serta perumusan kebijakan konten media daring yang beretika dan inklusif. Pimpinan organisasi perlu menginternalisasikan nilai moderasi ke dalam strategi literasi digital, etika bermedia, dan desain kebijakan institusional yang responsif terhadap dinamika masyarakat multikultural. Implementasi ini tidak hanya mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Quality Education) melalui penguatan pendidikan inklusif berbasis teknologi, SDG 10 (Reduced Inequalities) melalui pengelolaan keberagaman yang adil dan setara, serta SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan budaya damai di ruang publik digital.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa multikulturalisme dalam Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dan tidak dapat dipahami semata sebagai konsep sosial modern. Nilai-nilai seperti tasamuh, ta'aruf, 'adl, tawazun, rahmah, dan syura tertanam secara mendalam dalam ajaran Al-Qur'an, Sunnah, serta praktik sosial Nabi Muhammad SAW, terutama melalui Piagam Madinah sebagai model masyarakat majemuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa delapan prinsip teologis Islam tersebut dipahami dan diaplikasikan secara konsisten oleh praktisi pendidikan, sebagaimana tercermin dari skor rata-rata yang tinggi pada seluruh indikator relevansi. Selain itu, moderasi beragama (wasatiyyah) memiliki posisi strategis dalam merespons tantangan kontemporer, termasuk polarisasi identitas, radikalisme, dan disinformasi di era digital. Dalam konteks ini, multikulturalisme dan moderasi beragama berfungsi sebagai kerangka etika dalam ruang sosial dan digital yang dimediasi oleh teknologi dan media.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip teologis Islam khususnya wasatiyyah dan ummatan wasathan dengan teori manajemen strategis dan transformasi digital. Integrasi ini memperkaya diskursus teologis sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kurikulum pendidikan multikultural yang adaptif terhadap masyarakat digital. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui kurikulum inklusif, pembelajaran dialogis, dan penguatan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Secara lebih luas, temuan ini mendukung pencapaian SDG 4 (Quality Education), SDG 10 (Reduced Inequalities), dan SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), termasuk dalam penguatan etika dan budaya damai di ruang publik digital.

Meskipun menghasilkan temuan yang komprehensif, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Sebagian besar data juga bersumber dari dokumentasi literatur dan wawancara pada institusi tertentu, sehingga belum sepenuhnya menangkap keragaman implementasi multikulturalisme di berbagai konteks pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada lembaga

pendidikan di berbagai wilayah, melakukan studi longitudinal untuk memantau dinamika praktik moderasi beragama dari waktu ke waktu, serta mengembangkan pendekatan mixed methods guna menilai efektivitas model pembelajaran multikultural dan mengevaluasi implementasi kebijakan moderasi beragama secara lebih komprehensif.


7. SARAN


Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan kajian pada berbagai konteks kelembagaan dan wilayah yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi multikulturalisme dan moderasi beragama di era digital. Pendekatan longitudinal dan mixed methods juga perlu dikembangkan untuk menilai secara lebih mendalam efektivitas integrasi nilai wasatiyyah dalam pendidikan dan tata kelola organisasi, khususnya dalam merespons dinamika media digital, algoritma, dan disinformasi. Selain itu, kajian lanjutan yang mengaitkan moderasi beragama dengan kepemimpinan transformasi digital dan pengambilan keputusan strategis berbasis teknologi akan memperkaya kontribusi akademik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi lembaga pendidikan dan organisasi di masyarakat multikultural.

8. DEKLARASI

8.1. Tentang Penulis


Viona Miftahuljannah (VM)  <https://orcid.org/0009-0002-2738-7068>

Mohammad Al Farabi (MA)  <https://orcid.org/0000-0003-0289-0695>

Ahmad Darlis (AD)  <https://orcid.org/0000-0002-0504-8025>

Febrina Asmiralda (FA)  <https://orcid.org/0000-0003-1986-8531>

Aulia Rahmah Puteri (AR)  <https://orcid.org/0009-0008-9813-5056>

Yasir Mustafa Kareem (YM)  <https://orcid.org/0009-0008-5096-2300>

8.2. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: VM; Metodologi: MA; Perangkat Lunak: AD; Validasi: FA dan AR; Analisis Formal: YM dan VM; Investigasi: MA; Sumber daya: AD; Kurasi Data: FA; Penulisan Draf Awal: AR dan YM; Peninjauan dan Penyuntingan Tulisan: VM dan MA; Visualisasi: AD; Semua penulis, VM MA, AD, FA, AR dan YM, telah membaca dan menyetujui naskah yang telah diterbitkan.

8.3. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam studi ini tersedia atas permintaan dari penulis terkait.

8.4. Pendanaan

Penulis tidak menerima dukungan finansial untuk penelitian, kepenulisan, dan/atau penerbitan artikel ini.

8.5. Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan, konflik kepentingan finansial yang diketahui, atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Anwar and N. Sa'diyah, "Implementasi multikulturalisme dalam pendidikan islam di sekolah menengah," *Tarbiyah: Journal of Islamic Education*, vol. 27, no. 1, pp. 55–70, 2022.
- [2] Z. Qodir, I. Abdullah, and Y. Khisbiyah, "Digital radicalism and religious moderation in indonesian schools," *Sociology of Religion Journal*, vol. 14, no. 2, pp. 101–120, 2022.
- [3] N. Luthfiani, U. Rahardja, and Q. Aini, "Decentralized identity management using blockchain technology," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 3, no. 1, pp. 11–20, 2023.
- [4] UNESCO, *Global Education Monitoring Report: Diversity, Equity, and Inclusion in Education*. Paris: UNESCO Publishing, 2023.
- [5] Wahid Foundation, "Laporan indeks potensi intoleransi dan radikalisme remaja indonesia," Jakarta, 2022.

- [6] T. A. Wiratno and B. Callula, "Transformation of beauty in digital fine arts aesthetics: An artpreneur perspective," *APTISI Transactions on Technopreneurship*, vol. 6, no. 2, pp. 231–241, 2024.
- [7] S. Anwar and N. Sa'diyah, "Implementasi multikulturalisme dalam pendidikan islam di sekolah menengah," *Tarbiyah: Journal of Islamic Education*, vol. 27, no. 1, pp. 55–70, 2022.
- [8] Z. Qodir, I. Abdullah, and Y. Khisbiyah, "Digital radicalism and religious moderation in Indonesian schools," *Sociology of Religion Journal*, vol. 14, no. 2, pp. 101–120, 2022.
- [9] I. Hidayat and P. O. Sutria, "The influence of determined tax load, tax planning, and profitability on profit management in the manufacturing mining sector," *APTISI Transactions on Management*, vol. 7, no. 1, pp. 79–85, 2023.
- [10] A. Akhmadi, "Religious moderation in Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan*, vol. 16, no. 2, pp. 45–55, 2022.
- [11] S. Syamsuddin, "Wasathiyah Islam as a paradigm of moderate education," *Journal of Islamic Education Studies*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2022.
- [12] M. Yusuf, "Multicultural education and social cohesion in digital society," *Journal of Social Transformation*, vol. 8, no. 2, pp. 120–134, 2023.
- [13] D. Sutanto and F. Rahman, "Strategic innovation and digital business models for creative industry sustainability," *APTISI Transactions on Technopreneurship*, vol. 5, no. 1, pp. 112–125, 2023.
- [14] H. M. Al-Fadhli, "Digital ethics in Islamic education: Managing online religious discourse," *Journal of Digital Ethics*, vol. 3, no. 1, pp. 45–59, 2024.
- [15] T. Budiarmo and D. Nurhadi, "Strategic e-learning adoption in Islamic schools: Barriers and opportunities," *International Journal of Educational Technology*, vol. 17, no. 4, pp. 78–94, 2023.
- [16] S. Chandra and A. Wijaya, "Impact of AI adoption on organizational performance in SMEs," *Journal of Digital Business*, vol. 6, no. 2, pp. 110–126, 2023.
- [17] L. Damayanti and A. Putri, "Digital inclusion and education equity in post-pandemic era," *Education and Information Technologies*, vol. 30, no. 1, pp. 101–118, 2025.
- [18] S. El-Muhammadi and M. Rahman, "Religious moderation policy and digital governance: A comparative study," *Global Policy Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 255–275, 2024.
- [19] N. Luthfiani and Q. Aini, "Digital ethics and social responsibility in technology-mediated public spaces," *Technomedia Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 85–96, 2022.
- [20] R. Fahmi and B. Santoso, "Social media ethics and religious moderation among digital natives," *Journal of New Media Society*, vol. 29, no. 2, pp. 345–362, 2025.
- [21] P. E. Gunawan and M. Hasan, "Digital transformation strategy for education management in Islamic institutions," *Educational Management Review*, vol. 12, no. 1, pp. 65–82, 2023.
- [22] N. Hakim and R. Azmi, "Online identity, religious expression and moderation in Southeast Asia," *Asian Journal of Communication*, vol. 34, no. 2, pp. 200–218, 2024.
- [23] G. Indrawan and S. Lestari, "Integrating digital literacy into Islamic education curriculum," *Journal of Curriculum Studies*, vol. 27, no. 3, pp. 142–157, 2025.
- [24] K. Junaidi and R. Safitri, "Ethical AI framework for religious mobile applications," *Journal of AI and Society*, vol. 9, no. 2, pp. 125–140, 2023.
- [25] R. Wahyudi, "Tawazun and ethical balance in contemporary Islamic thought," *Journal of Islamic Ethics*, vol. 4, no. 1, pp. 33–47, 2022.
- [26] N. Luthfiani and Q. Aini, "Digital ethics and strategic leadership in higher education," *International Journal of Cyber and IT Service Management*, vol. 3, no. 2, pp. 145–156, 2023.
- [27] K. Schwab, *The Fourth Industrial Revolution Revisited*. Geneva: World Economic Forum, 2022.
- [28] A. Smith and J. Anderson, "Social media algorithms and polarization in digital societies," *Digital Society Journal*, vol. 6, no. 3, pp. 201–215, 2022.
- [29] U. Rahardja *et al.*, "Strategic management of digital transformation in educational institutions," *Education and Information Technologies*, vol. 28, no. 4, pp. 5123–5140, 2023.
- [30] P. M. Leonardi, "Digital materiality and organizational transformation," *Organization Studies*, vol. 44, no. 5, pp. 789–805, 2023.
- [31] M. Hidayat and R. Nurhasanah, "Multikulturalisme dalam pendidikan Islam sebagai upaya penguatan moderasi beragama," *Al-Warits: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 15–28, 2022.
- [32] M. Castells, "Network society and identity politics in the digital age," *Information, Communication & Society*, vol. 26, no. 7, pp. 1089–1104, 2023.

- [33] R. R. Sari and A. Wijaya, "Strategic management practices and organizational performance in small and medium enterprises," *APTISI Transactions on Management*, vol. 6, no. 2, pp. 134–142, 2022.
- [34] S. Aziz and S. Suudin, "Strengthening religious moderation in islamic education learning in the digital era," *Jurnal Al Burhan*, 2025, online.
- [35] N. P. L. Santoso, "Religious moderation in islamic education through social media," *Al-Waarits*, 2025. [Online]. Available: <https://journal.pandawan.id/al-waarits/article/view/878>
- [36] M. Sya'bani, "Internalization of religious moderation through islamic higher education institutions," *Journal of Religious Studies*, 2024.
- [37] M. Ismail, "Internalization of 21st century religious moderation values through social media," in *Proceedings of the International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 2023.
- [38] R. Handayani, "Religious moderation discourses on digital platforms: Youtube and public engagement," *Insaniyat Journal*, 2025.
- [39] F. Firayani, "Digital moderation in islamic education: Literacy, ethics, and inclusivity," *PdINUSA Journal*, 2025.
- [40] R. Defriza, "Islam and multiculturalism in building social harmony," *Scaffolding Journal*, 2025.
- [41] A. Guci, "The transformation of islamic education in the digital era: A systematic literature review," *Azzaida Journal*, 2025.
- [42] Z. I. Nuriana, "Digital da'wah in the age of algorithm: Transformation and engagement," *International Journal of Islamic Studies*, 2024.
- [43] R. A. Rahman and S. Huda, "Religious moderation and digital literacy among generation z," *Journal of Contemporary Islamic Studies*, vol. 7, no. 2, pp. 88–102, 2024.
- [44] U. Rahardja, Q. Aini, N. Luthfiani, and A. Khoirunisa, "Blockchain-based secure data management for digital services," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022.
- [45] A. K. Pratama, "Strategic management for sustainable digital organizations," *Journal of Digital Business Strategy*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2025.
- [46] A. Fauzi and S. Ma'arif, "Moderasi beragama dan tantangan pendidikan islam di era digital," *Al-Warits: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 101–115, 2023.
- [47] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Moderasi beragama," <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/islam-pluralisme-dan-multikulturalismenbsp-oqfeej>, 2025, accessed: Aug. 2025.
- [48] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Peta jalan mempercepat transformasi digital," <https://bysl.pw/kemenagdoronggurupaisusunprogrampenguatan>, 2025, accessed: Aug. 2025.
- [49] L. Floridi and J. Cowls, "A unified framework of five principles for ai in society," *Harvard Data Science Review*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2022.
- [50] M. Bond and S. Bedenlier, "Facilitating digital transformation in higher education: Pedagogical and organizational perspectives," *Educational Technology Research and Development*, vol. 71, no. 2, pp. 563–582, 2023.
-